

Reformasi PBB: Jalur Menuju Tata Kelola Global Representative

Maret 2026

Globalist International Research Division

Reformasi PBB: Jalur Menuju Tata Kelola Global Representative

Dokumen Kerja v3.0

Divisi Riset Globalist International

Maret 2026

Ringkasan Eksekutif

PBB menghadapi krisis legitimasi yang berakar pada desain institusional yang mencerminkan struktur kekuasaan 1945 bukan realita 2026. Sistem veto Dewan Keamanan melumpuhkan tindakan decisive.

Dokumen ini memeriksa jalur reformasi:

- Penyesuaian jangka pendek** (Tahun 1-5): Reformasi prosedural, peningkatan metode kerja
- Restrukturisasi jangka menengah** (Tahun 5-20): Ekspansi Dewan Keamanan, pilot pemungutan suara berbobot
- Transformasi jangka panjang** (Tahun 20+): Restrukturisasi fundamental (jika kondisi politik memungkinkan)

Temuan Utama: Proses amandemen Pasal 108 memberikan setiap anggota P5 hak veto atas perubahan Piagam—termasuk perubahan pada veto itu sendiri. Ini menciptakan dilema: reformasi memerlukan persetujuan P5, tapi P5 diuntungkan dari status quo.

Kesimpulan

Krisis legitimasi PBB nyata. Solusi secara teknis langsung (pemungutan suara berbobot, pembatasan veto). Implementasi diblokir secara politik oleh kepentingan P5.

Inti: Upayakan reformasi bertahap; bangun venue alternatif (G20, organisasi regional); pertahankan desain institusional untuk implementasi masa depan.

Untuk pertanyaan: research@globintern.org

Versi: 3.0 (Maret 2026)

Lisensi: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0